



NASKAH AKADEMIK PENDAMPINGAN RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN KOTA SURAKARTA

Disusun oleh

Rino A Nugroho S.Sos, M.T.I, PhD

Oktober 2021

Halaman Pengesahan

Naskah Akademik Pendampingan Rencana Strategis 2021 – 2026

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Kota Surakarta Tahun 2021

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rino Ardhian Nugroho, S.Sos, M.T.I, Ph.D

Alamat : Jl Bhayangkara No 11, Surakarta, 57141

Pekerjaan : Dosen

Bersama dengan ini, saya selaku tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian menyatakan bahwa laporan hasil analisis penyusunan Rencana Strategis berikut ini dibuat dengan sebenar-benarnya melalui data dan analisis akademis. Hal-hal yang berkaitan dengan analisis tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ke depannya.

Surakarta, 12 Oktober 2021

Salam Hormat

Rino A Nugroho, S.Sos, M.T.I, Ph.D

1. PENDAHULUAN

Keberadaan perencanaan strategis penting bagi berjalannya organisasi dengan baik. Melalui perencanaan yang matang kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi dapat dialokasikan dengan baik sehingga dapat terlaksana. Melalui perencanaan strategis ini kegiatan akan terlaksana secara berkesinambungan dan saling terkait selama periode waktu tertentu. Hal ini dilakukan di berbagai jenis organisasi, termasuk organisasi publik dimana instansi pemerintah merupakan salah satunya.

Perencanaan strategis yang matang bagi organisasi publik menjadi penting untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi Information Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kota Surakarta, Menyusun Rencana Strategis 2021 – 2026. Rencana ini disusun sebagai jabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah.

Di Indonesia rencana strategis untuk instansi pemerintah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) disebutkan bahwa perangkat daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Lebih lanjut sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kementerian/Lembaga selayaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembagian tugas dalam rangka mencapai sasaran nasional. Hal ini menyiratkan bahwa penyusunan rencana strategis di perangkat daerah, dalam hal ini di Diskominfo SP Kota Surakarta tidak hanya merujuk pada RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 tetapi juga merujuk pada Renstra K/L dimana tugas dan fungsi Diskominfo SP Kota Surakarta berada.

Berdasarkan paparan di atas dapat dinyatakan bahwa menyelaraskan perencanaan strategis dari tingkat pemerintahan membutuhkan analisa yang cermat agar seluruh tugas dan fungsi perangkat daerah dapat diakomodasi dalam perencanaan strategis dimaksud. Naskah akademik ini akan memuat kajian tentang teori dan pemikiran ilmiah berkaitan dengan penyusunan rencana strategis. Kajian teori dan pemikiran ilmiah ini akan berfungsi sebagai alat bantu bagi Diskominfo SP Kota Surakarta untuk Menyusun Renstra Diskominfo SP Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

2. KAJIAN TEORI

Pada mulanya perencanaan strategis diterapkan untuk sektor swasta. Dengan adanya perubahan dan perkembangan bahwa perencanaan strategis yang dikembangkan sektor swasta dapat membantu organisasi publik, dan nirlaba maupun komunistas atau entitas lainnya, untuk mengatasi lingkungannya yang sedang berubah secara dramatis, dan dengan demikian dapat membantu organisasi tersebut menjadi lebih efektif (Bryson, 2007: 25). Akan tetapi, dalam prakteknya perencanaan strategis di sektor swasta memfokuskan kepada organisasi yang bertujuan memperoleh laba. Perencanaan strategis dalam sektor publik terutama diterapkan untuk tujuan militer dan praktik penyelenggaraan negara (*statecraft*) dalam skala yang sangat besar (Quin, 1980; Bracker, 1980 dalam Bryson, 2007: 5). Proses perencanaan strategis pada dasarnya merupakan proses pembuatan tujuan (*goal making process*) sekaligus juga merupakan proses pembuatan strategi (*strategy making process*) (Ismail Solihin, 2012: 10).

Dari berbagai penjelasan mengenai perencanaan strategis di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses perencanaan yang bersifat terstruktur, sistematis dan terorganisasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Perencanaan strategis juga memiliki arti penting untuk menghasilkan suatu keputusan maupun tindakan yang dilakukan guna mengenal dan memahami bagaimana menjadi suatu organisasi, apa yang dilakukan organisasi, dan untuk siapa organisasi melakukannya, serta mengapa organisasi melakukan hal tersebut.

Winardi (1989: 307) juga menambahkan mengenai pengertian perencanaan strategi yang diformalisasi dalam arti bahwa terdapat adanya suatu proses yang matang dalam hal menyusun rencana-rencana strategis, tetapi setidaknya proses tersebut jangan dianggap sebagai suatu pendekatan yang sangat terstruktur, tetapi sebagai proses yang terorganisasi dengan apa para manajer mengkoordinasi upaya-upaya perencanaan mereka. Dalam perencanaan strategis memiliki peranan yang sangat penting bagi organisasi. Menurut Burhan (1994) dalam Murwaningsih (2013:7-9), menyatakan beberapa alasan penting perencanaan strategi yang formal merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan organisasi yang antara lain disebabkan oleh:

1. Perencanaan strategi perlu untuk meringankan tanggung jawab manajemen puncak secara efektif.
2. Perencanaan strategi memaksa para manajer mengajukan pertanyaan dan jawaban atas berbagai persoalan yang sangat penting untuk perusahaan.
3. Perencanaan dapat mensimulasikan masa depan di atas kertas, tentu jauh lebih murah, namun tetap memungkinkan suatu perusahaan mengambil keputusan dengan lebih baik, tentang apa yang harus

dilakukannya sekarang sehubungan dengan peluang dan ancaman di masa depan daripada menunggu terjadinya peristiwa-peristiwa mendatang. Perencanaan itu sendiri membuat peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan pada masa depan semakin jelas.

4. Perencanaan perlu untuk menunjang pelaksanaan fungsi manajerial yang lain dengan lebih baik.
5. Perencanaan strategi mengarahkan perhatian manajemen puncak pada masalah-masalah pokok dan membantu menetapkan prioritas yang tepat untuk mengatasinya.
6. niscaya perlu dikaitkan secara erat ciri-ciri unik dari setiap perusahaan yang menerapkannya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa perencanaan strategis dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi lingkungan internal maupun eksternal organisasi yang akan digunakan dalam menentukan suatu keputusan. Tujuan utama dari perencanaan strategis adalah untuk menghasilkan kebijakan atau tindakan-tindakan organisasi yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dilakukan organisasi, dan mengapa organisasi melakukan tindakan tersebut.

3. ANALISA

Kajian teori sebelumnya menjabarkan bahwa perencanaan strategis digunakan untuk memberikan arah bagi organisasi dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal dari organisasi. Dalam hal ini adalah lingkungan internal dan eksternal dari perangkat daerah Diskominfo SP Kota Surakarta. Analisa lingkungan eksternal dan internal dapat dilakukan dengan menggunakan analisa SWOT. Berdasarkan analisa dokumen dan wawancara dengan staf Diskominfo SP diperoleh beberapa hasil kunci dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut.

a) Kekuatan (Strength – S)

- i. Memiliki aplikasi pelayanan masyarakat terpadu dalam aplikasi Solo Destination;
- ii. Memiliki peran dalam pengembangan perangkat digital di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
- iii. Memiliki peranan dalam komunikasi internal dan eksternal pemerintah;
- iv. Memiliki peran sebagai leading sector dalam perubahan menuju pemerintahan yang efektif dan efisien melalui perubahan proses manual menjadi digital;
- v. Memiliki berbagai kanal informasi social media yang mendorong transparansi pemerintah kepada masyarakat.

b) Kelemahan (Weakness – W)

- i. Belum optimalnya proses surat menyurat secara elektronik;
- ii. Belum optimalnya capaian skor indek keterbukaan informasi public;
- iii. Belum optimalnya capaian skor indek SPBE;
- iv. Masih rendahnya nilai Indeks KAMI;
- v. Belum terpenuhinya metadata lokal sesuai standar data

c) Peluang (Opportunity – O)

- i. Wacana industry 4.0 dan society 5.0 yang mendorong masyarakat menggunakan teknologi informasi dalam kesehariannya;
- ii. Program dan kegiatan instansi vertical pada tupoksi serupa yang mendukung program/kegiatan Diskominfo SP Kota Surakarta;
- iii. Penggunaan perangkat digital di bidang pendidikan semasa pandemi mendorong adopsi teknologi yang luas di masyarakat

d) Ancaman (Threat – T)

- i. Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat dan pelayanan publik berbasis tatap muka;
- ii. Kurangnya literasi digital masyarakat;
- iii. Maraknya penipuan dan pencurian data digital di tengah masyarakat

Berdasarkan paparan diatas disusun matriks SWOT sebagai berikut:

	Strength	Weakness
Threat	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan Solo Destination sebagai saluran pelayanan public • Memanfaatkan komunikasi internal dan eksternal untuk meningkatkan literasi digital • Membangun aplikasi/system mandiri untuk menjaga privasi data 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan SPBE untuk mengurangi pencurian data digital; • Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung keamanan data
Opportunities	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong integrasi aplikasi di internal pemerintah Kota Surakarta • Memanfaatkan system yang ada di Pemkot Surakarta untuk masuk ke dalam society 5.0 • Mendorong pemakaian aplikasi Solo Destination untuk saluran komunikasi publik 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan instansi vertical dengan tugas pokok dan fungsi yang serupa; • Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pemerintah Kota Solo kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan teknologi digital

Salah satu Langkah yang dapat diambil berkaitan dengan untuk Menyusun renstra berdasarkan dari matriks SWOT adalah melakukan sinkronisasi kegiatan dengan instansi vertical dengan tugas pokok dan fungsi yang serupa. Berdasarkan pembahasan dengan tim penyusun resntra Diskominfo -SP dapat ditelaah bahwa instansi yang berhubungan dengan tupoksi Diskominfo – SP antara lain adalah:

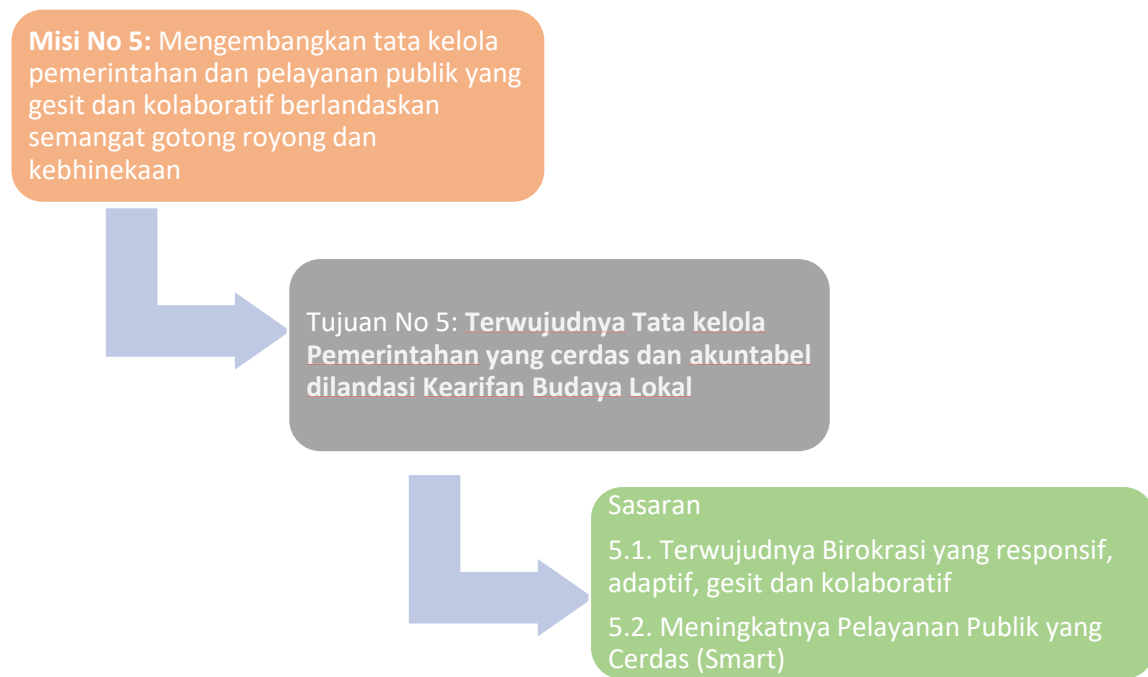
- a) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo)
- b) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- c) Badan Pusat Statistik (BPS)
- d) Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

Setiap instansi tersebut kemudian ditelaah masing-masing rencananya dan kemudian ditelaah. Sasaran yang relevan akan menjadi dasar dalam penyusunan renstra Diskominfo – SP. Beberapa catatan yang dapat dilakukan di Pemerintah Kota Surakarta dapat diringkas sebagai berikut:

<p>Kominfo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis; • Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital; • Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah; • Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
<p>BPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas • Penguatan statistik sektoral K/L/D/I • SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata Kelola kelembagaan
<p>BSSN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia. • Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima
<p>Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; • Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral; • Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Telaahan lebih lanjut dilakukan pada RPJMD Kota Surakarta untuk melakukan sinkronisasi dengan renstra Diskominfo-SP. Berdasarkan telaahan terhadap RPJMD Kota Surakarta 2021 – 2026 diperoleh tugas pokok dan fungsi Diskominfo -SP dijabarkan pada Misi Kota Surakarta No 5 dari RPJMD Kota Surakarta 2021 – 2026, yaitu “Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan”. Kata kerja gesit dan kolaboratif disini selain dimaksudkan pada peningkatan kapasitas SDM Pemkot Surakarta juga dapat dimaknasi sebagai pemanfaatan perangkat teknologi

informasi yang memfasilitasi kecepatan pelayanan, baik melalui media Internet, cloud system, big data dan lainnya. Misi tersebut relevan dengan Tujuan No 5 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi budaya lokal". Akhirnya tujuan No 5 tersebut berhubungan dengan Sasaran 5.1 Terwujudnya Birokrasi yang responsif, gesit dan kolaboratif dan Sasaran 5.2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Smart. Kesesuaian sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini.



Setelah renstra Diskominfo – SP Kota Surakarta 2021 – 2026 selesai disusun dilakukan uji public pada tanggal 15 September 2021. Pada uji public tersebut beberapa pertanyaan dari stakeholder dicatat dan diberi tanggapan. Poin – poin penting dari pertanyaan dan tanggapan terhadap uji public renstra ini adalah sebagai berikut:

- a) Sosialisasi yang dilakukan tentang pemanfaatan teknologi informasi dirasa kurang menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Tanggapan: sudah dilakukan berbagai pendekatan untuk sampai ke masyarakat, ke depannya perlu ada pelibatan pegiat media sosial di sekitar Solo agar lebih dapat diterima masyarakat luas.
- b) Seringkali dalam memperoleh data, perangkat daerah menggunakan google form, apakah itu aman? Bagaimana dengan data masyarakat?
Tanggapan: saat ini pemerintah kota sudah mengikuti standar keamanan BSSN, yaitu indeks KAMI, sehingga secara infrastruktur sudah dirasa aman. Kegiatan untuk meningkatkan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat juga *aware* terhadap keamanan data di era serba digital ini.
- c) Saat ini ada kegiatan Lapor Mas Wali, perlu ada SOP agar alur bisa lebih baik

Tanggapan: Pemkot Solo sudah memiliki SOP untuk aduan public yang sudah ada di ULAS. SOP yang sama bisa digunakan untuk Lapor Mas Wali.

- d) Ada keluhan bahwa jaringan Internet terkadang mengalami kendala untuk kegiatan daring. Juga dirasa perlu memiliki aplikasi-aplikasi berbasis cloud untuk mempermudah kolaborasi pekerjaan antar perangkat daerah.

Tanggapan: Beberapa aplikasi cloud sudah dikembangkan oleh Diskominfo – SP yang tersedia di <https://dropbox.surakarta.go.id>. Jika ada kendala jaringan dapat disampaikan untuk ditindaklanjuti.

- e) Pihak akademisi menyarankan Kerjasama untuk penelitian dan pengabdian masyarakat demi pengembangan Diskominfo – SP.

Tanggapan: terbuka untuk bekerjasama.

Berdasarkan uji public tersebut diberikan beberapa masukan sebagai berikut:

- i. Digital safety untuk menjaga keamanan data masyarakat dapat dilakukan dengan standarisasi keamanan sesuai BSSN (indeks KAMI) dan melalui pendekatan edukasi user melalui program sosialisasi literasi digital.
- ii. Perlu ada kegiatan penyusunan SOP Lapor Mas Wali yang dapat mengacu pada SOP ULAS yang sudah berjalan sejauh ini dengan beberapa penyesuaian.
- iii. Perlu ada helpdesk yang mudah diakses bagi perangkat daerah lain untuk mendeteksi kendala jaringan atau perangkat teknologi informasi lainnya.

4. PENUTUP

Di era perkembangan teknologi informasi yang kian pesat, peran Diskominfo -SP menjadi krusial untuk mendukung kinerja perangkat daerah lain dan juga meningkatkan interaksi layanan public. Menggunakan berbagai konsep teknologi terkini seperti Big Data, Cloud Computing, Machine Learning menjadi kata kunci dalam peningkatan teknologi informasi. Diskominfo – SP Kota Surakarta berupaya untuk memanfaatkan konsep-konsep terbaru tersebut untuk interkoneksi data internal guna peningkatan layanan public. Melalui penyusunan Renstra 2021 – 2026.

Penyusunan renstra Diskominfo – SP Kota Surakarta 2021 – 2026 ini juga harus sejalan dengan RPJMD Kota Surakarta dan instansi lain yang memiliki fungsi serupa seperti Kominfo, BSSN, BPS dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Melalui sinkronisasi tersebut diharapkan kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan akan saling terhubung dan pada akhirnya mampu menopang tercapainya Visi Misi Walikota Surakarta dan juga tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Laporan ini disusun sebagai naskah akademik untuk memaparkan kajian teoritis tentang pentingnya perencanaan strategis bagi organisasi public dan juga menganalisa sinkronisasi renstra Diskominfo – SP dengan RPJMD dan renstra instansi vertikal dengan fungsi serupa. Catatan-catatan tentang uji public, tanggapan dan masukan terhadap perbaikan renstra Diskominfo – SP 2021 – 2026 juga dijabarkan secara ringkas dalam laporan ini.